

Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara

Rahmat Esa Putra^{a*}, Yeniwati^b

^{a,b} Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: : rahmatesap@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

29 Juli 2022

Disetujui:

30 Agustus 2022

Terbit daring:

4 November 2022

DOI: -

Sitasi:

Putra, Rahmat, Esa., & Yeniwati. (2022). Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 11(2), 98-106.

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze: (1) To what extent does the degree of fiscal decentralization influence economic growth in North Sumatra, (2) To what extent does transfer dependency influence economic growth in North Sumatra, (3) To what extent does the capital expenditure ratio influence economic growth in North Sumatra, (4) How far is the degree of fiscal decentralization, transfer dependency, and the ratio of capital expenditure to economic growth in North Sumatra. The data used is panel secondary data for 33 regencies/cities in North Sumatra from 2014-2019, data obtained from institutions related to the research variables which are grouped into two parts, namely the dependent variable which in this study uses economic growth and the independent variables which consist of degree of fiscal decentralization, transfer dependency, and capital expenditure ratio. This study uses panel data regression analysis using the fixed effect model (FEM). The results of this study indicate that simultaneously, fiscal decentralization has a significant effect on economic growth in North Sumatra. while partially (1) The degree of fiscal decentralization has a negative and significant effect on economic growth (2) transfer dependence has a positive and insignificant effect on economic growth (3) the ratio of capital expenditure has a positive and insignificant effect on economic growth in North Sumatra.

Keywords: Degree of fiscal decentralization, transfer dependency, capital expenditure ratio, economic growth

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Sejauhmana pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, (2) Sejauhmana pengaruh ketergantungan transfer terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, (3) Sejauhmana pengaruh rasio belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, (4) Sejauhmana derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan transfer, dan rasio belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder panel untuk 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dari tahun 2014-2019, data diperoleh dari lembaga terkait dengan variabel penelitian yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu variabel terikat yang pada penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi dan variabel bebas yang terdiri dari derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan transfer, dan rasio belanja modal. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan fixed effect model (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. sedangkan secara parsial (1) Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (2) ketergantungan transfer berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (3) rasio belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Kata Kunci : Derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan transfer, rasio belanja modal, pertumbuhan ekonomi

Kode Klasifikasi JEL: F43; H87; P34

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur yang sangat berarti dalam kajian ekonomi makro, dalam pandangan yang luas pertumbuhan ekonomi menandakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menciptakan perubahan dalam struktur social masyarakat yang dapat menciptakan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Widiaty & Nugroho, 2020). Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada masyarakatnya, kemampuan ini berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan keharusan dalam peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan pembangunan ekonomi (Dinar and Hasan 2018). Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena dengan diadakannya otonomi daerah maka pemerintah dapat leluasa untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Ngurah and Kartika, 2014:81).

Menurut teori Keynesian salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan asli daerah, sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 3 ayat 1 yang melaporkan bahwa PAD bertujuan membagikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penerapan otonomi daerah cocok dengan kemampuan wilayah selaku perwujudan desentralisasi (Delingga & Marwa, 2016).

Salah satu sistem yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah melalui kebijakan fiskal di antaranya pelaksanaan otonomi daerah karena dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah dapat leluasa untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah (Jaya and Dwirandra 2014). Pada dasarnya desentralisasi fiskal merupakan upaya untuk memberdayakan daerah dalam mengatur pembangunan di daerahnya. Berbagai inovasi dan kreativitas diharapkan mampu dimiliki oleh setiap daerah, sehingga bisa meminimalisir tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

Terlebih penting lagi adalah dengan adanya desentralisasi fiskal, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik yang sifatnya langsung disalurkan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung disalurkan, seperti pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan demikian penyediaan barang-barang publik dan pelayanan publik akan lebih terjamin.

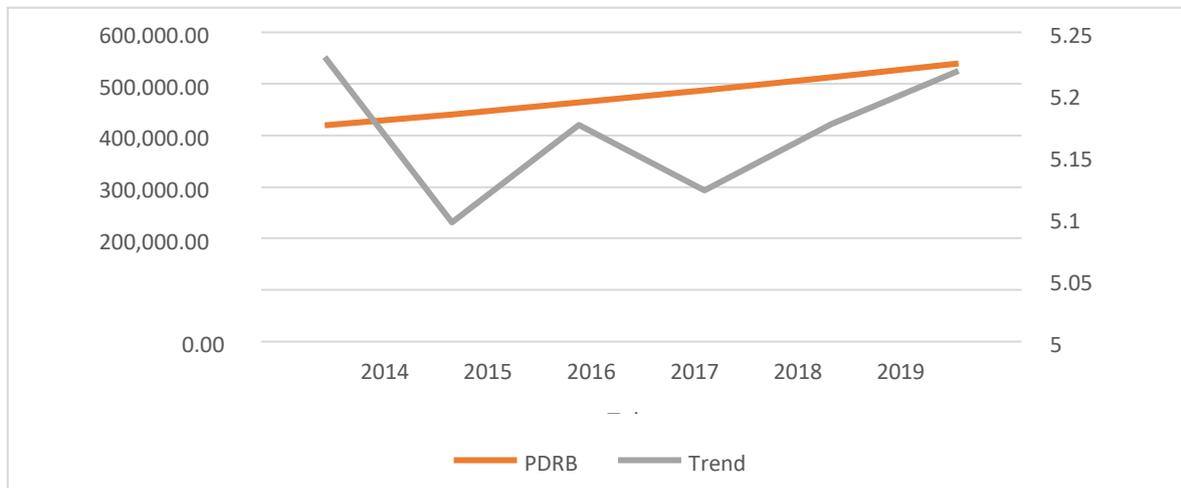
Ketergantungan transfer yang merupakan indikator dalam pelaksanaan desentralisasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. ketergantungan transfer menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap dana yang ditransfer oleh pusat dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Indikator tersebut dihitung dari rasio antara dana transfer dengan total penerimaan daerah.. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nantharath et al., 2019) yang memiliki hasil bahwa ketergantungan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam menjalankan perekonomian campur tangan pemerintah memang harus diperlukan terutama dalam hal pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sangat efektif untuk menjalankan roda perekonomian, misalnya saat terjadi resesi maka pemerintah akan mengambil kebijakan fiskal ekspansif dimana pengeluaran pemerintah ditingkatkan. Pengeluaran yang tinggi akan mengarah kepada peningkatan permintaan barang dan jasa dalam perekonomian sehingga merangsang bisnis untuk meningkatkan produksi mereka. Dalam hal ini terdapat salah satu indikator dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu rasio belanja modal, dimana indikator tersebut didapat dari rasio belanja modal terhadap total belanja daerah.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang menjadi penopang ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, kegiatan ekonomi di provinsi Sumatera Utara berkontribusi hampir 5% produk domestik bruto (PDB) pada 2019. Sumatera Utara merupakan kontributor

PDB terbesar setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa

Tengah serta menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera. Jika di rata-ratakan dari tahun 2014 sampai 2019 maka Sumatera Utara memiliki PDRB sebesar Rp 477.354,68 dan disusul oleh Riau dengan PDRB sebesar Rp 467.455,98. Berikut trend pertumbuhan PDRB di Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2019.



Sumber : BPS Indonesia, 2020

Grafik 1. Trend Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2019

Dari Grafik 1. dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB di Sumatera Utara mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2014 laju PDRB di Sumatera Utara adalah 5,23% dan merupakan yang tertinggi sepanjang tahun 2014-2019.

Namun pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB mengalami penurunan yang signifikan dan sekaligus menjadi yang terendah selama periode 2014 sampai 2019 yaitu sebesar 0.13% sehingga laju PDRB pada tahun 2015 menjadi 5,10%. Penurunan pada laju pertumbuhan ekonomi tersebut diduga disebabkan oleh faktor ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi global yang mengakibatkan penyebaran siklus kebijakan moneter antara berbagai Negara, mulai dari Amerika Serikat, China, Eropa dan Jepang. Selain itu penurunan ini kemungkinan juga disebabkan oleh kondisi harga komoditas yang terus menurun sehingga berdampak signifikan pada kinerja ekspor. Struktur ekspor Indonesia yang lebih berbasis sumber daya alam memberikan pengaruh signifikan pada perlambatan kinerja di berbagai sektor perekonomian. Pada sisi lain, kurangnya sumber-sumber pembiayaan domestik menyebabkan ketergantungan pada sumber pembiayaan luar negeri menjadi tinggi, terutama dalam bentuk arus modal portofolio dan utang luar negeri swasta (Finance 2016).

Provinsi yang memiliki ibu kota di Medan ini juga memiliki berbagai macam destinasi wisata alam yang mampu menggenjot perekonomian dalam sektor pariwisata salah satunya adalah Danau Toba. Data BPS Daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2018 menunjukkan sektor kehutanan, perikanan, dan pertanian seperti perkebunan coklat, karet, kopi, kelapa sawit, dan kelapa sebagai penopang utama perekonomian. Kontribusinya mencapai 21% dari total PDRB (News, 2020).

Selain itu sepanjang tahun 2014-2019 Sumatera Utara juga menjadi provinsi yang memiliki PAD tertinggi di Sumatera. Plt Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara Riswan mengatakan potensi PAD sebagian besar masih berasal dari pajak kendaraan bermotor sekitar Rp2 triliun, diikuti bea balik nama kendaraan bermotor sekitar Rp1,4 triliun. Pihaknya akan mengoptimalkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai salah satu strategi mencapai target PAD tahun ini (Bisnis.com 2020). Adapun langkah yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk mempermudah sistem dan memperjelas proses mulai dari pendaftaran sampai penunggakan dana oleh wajib pajak/retribusi.

Dengan demikian pelayanan akan menjadi lebih responsif untuk hasil pendaftaran objek pajak dan subjek pajak menjadi lebih tertib, adanya perekaman data, mampu mengidentifikasi objek pajak. Dengan begitu akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih bertanggung jawab (Sumut 2019).

TINJAUAN LITERATUR

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets adalah upaya suatu negara untuk menyediakan masyarakatnya dengan berbagai produk ekonomi yang tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi, lembaga, dan penyesuaian ideologis yang diperlukan dalam jangka panjang. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan perkapita. Indikator ini menggambarkan kemampuan daerah untuk meningkatkan PDRB ketika laju pertumbuhan PDRB lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk (Khamdana, 2016). Model Pertumbuhan Solow menjelaskan bagaimana pengaruh pertumbuhan angkatan kerja, pertumbuhan persediaan modal, dan perkembangan teknologi saling berinteraksi dalam suatu perekonomian terhadap total output barang dan jasa di suatu negara. Akumulasi modal terbentuk ketika sebagian dari pendapatan disimpan dan diinvestasikan kembali dengan maksud untuk meningkatkan output dan pendapatan untuk masa yang akan datang. Pertumbuhan modal dan angkatan kerja merupakan dua factor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal terdiri dari desentralisasi penerimaan dan desentralisasi pengeluaran. Desentralisasi penerimaan atau derajat desentralisasi fiskal merupakan rasio dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah, sedangkan desentralisasi pengeluaran disebut juga dengan rasio belanja modal yang mana variabel ini dihitung dari rasio antara belanja modal daerah dengan total belanja daerah sebagaimana yang dinyatakan oleh Zhang dan Zou dan Woller dan Phillips. Namun, Akai dan Sakata menambahkannya dengan indikator otonomi dengan pertimbangan : 1) pembelanjaan pemerintah daerah dapat berasal dari blok transfer yang bersumber dari pemerintah pusat. Jumlah pembelanjaan pemerintah daerah yang besar bukan berarti menandakan sebuah kemandirian, hal ini dikarenakan masih terdapat dana transfer yang merupakan pencerminan pemberian kekuasaan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi, 2) suatu daerah bisa disebut mempunyai kemampuan fiskal secara mandiri apabila mempunyai sumber PAD yang besar walaupun jumlahnya terhadap pengeluaran dan penerimaan pemerintah keseluruhan tidak besar (Khamdana, 2016).

Teori utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah teori Federalisme Fiskal. Teori Federalisme Fiskal (Fiscal Federalism) merupakan teori yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengerti persoalan tentang bagaimana pengaruh desentralisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan kondisi ekonomi, pelayanan terhadap masyarakat, dan kesejahteraan masyarakatnya (Samudra & Handayani, 2020).

Oates menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini didasari bahwa pemerintah daerah akan menjadi lebih mudah dalam menyediakan dan memproduksi barang publik. Hal ini juga didukung oleh proses pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang nantinya akan lebih menampung keinginan masyarakat daerah dan memicu terjadinya efisiensi alokasi (Rahman et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan induktif. Penelitian ini menggunakan data panel 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dari tahun 2014-2019. Data tersebut diolah menggunakan Eviews 9. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah derajat desentralisasi fiskal,

ketergantungan transfer, dan rasio belanja modal. Sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi.

Bentuk persamaan pada model regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model* (FEM) dirumuskan sebagai berikut :

$$PE = \beta_0 + \beta_1 DDF_{it} + \beta_2 KT_{it} + \beta_4 RBM_{it} + u_{it} \quad (1)$$

Dimana, PE adalah Pertumbuhan Ekonomi, DDF adalah Derajat Desentralisasi Fiskal, KT adalah Ketergantungan Transfer, RBM adalah Rasio Belanja Modal, U adalah Error Term, i adalah Wilayah, T adalah Tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan uji estimasi panel maka model yang terpilih adalah *fixed effect model* (FEM).

Tabel 1. Uji Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variabel: Y				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.045469	0.012968	-3.506173	0.0006
X2	0.002270	0.005143	0.441330	0.6596
X3	0.000899	0.006106	0.147321	0.8831
C	5.473884	0.383558	14.27132	0.0000

Sumber : Data Olahan Evies, 2022

Berdasarkan Tabel 1. Fixed Effect Model di atas didapatkan hasil persamaan regresi panel sebagai berikut :

$$Y = 5,473884 - 0,045469(X1) + 0,002270(X2) + 0,000899(X3) \quad (2)$$

Dilihat dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta (α_0) sebesar 5,473884, hal ini menunjukkan bahwa jika derajat desentralisasi fiskal (X1), ketrgantungan transfer (X2) dan rasio belanja modal (X3) sebesar nol, maka pertumbuhan ekonomi (Y) di Indonesia meningkat 5,473884. Derajat desentralisasi fiskal (X1) memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Sumatera Utara dengan koefisien regresinya sebesar -0,045469. Hal ini menunjukkan bahwa jika derajat desentralisasi fiskal (X1) meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,045469.

Ketergantungan transfer (X2) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Sumatera Utara dengan koefisien regresinya sebesar 0,002270. Hal ini menunjukkan bahwa jika ketergantungan transfer (X2) meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,002270. Rasio belanja modal (X3) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Sumatera Utara dengan koefisien regresinya sebesar 0,000899. Hal ini menunjukkan bahwa jika rasio belanja modal (X3) meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,000899.

Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara

Berdasarkan hasil olahan regresi data panel menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berhubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini menyatakan bahwa ketika derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat berarti,

sebaliknya jika derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan.

PAD yang merupakan unsur pembangun derajat desentralisasi fiskal ternyata belum mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara bahkan menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan perekonomian. Hal ini bertentangan dengan teori Keynes yang mengatakan bahwa PAD dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak penerimaan daerah maka pemerintah daerah akan lebih banyak mengeluarkan anggarannya untuk membelanjakan kebutuhan daerah.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Yang, (2016) yang mengatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal di sektor sekunder (manufaktur dan konstruksi) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di China. Hal ini menunjukkan bahwa dampak derajat desentralisasi fiskal di sektor sekunder memiliki efek yang terlalu agresif dalam merugikan pertumbuhan ekonomi di China.

Penelitian Khamdana, (2016) juga mendapatkan hasil yang sama, dimana desentralisasi fiskal melalui desentralisasi pendapatan atau derajat desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Situasi ini menandakan bahwa kebijakan penerimaan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) sepanjang periode penelitian cenderung membebani perekonomian daerah.

Pengaruh Ketergantungan Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara

Ketergantungan transfer berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini menyatakan bahwa ketika ketergantungan transfer mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan namun tidak begitu berarti, sebaliknya jika ketergantungan transfer mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan teori dimana dana transfer yang diberikan pemerintah pusat memang dapat membantu daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dana transfer bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah melalui pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yushkov, (2015) yang meneliti tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Wilayah Rusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa indikator desentralisasi fiskal melalui ketergantungan transfer daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Rusia. Hal ini disebabkan karena dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dibelanjakan langsung oleh pemerintah daerah untuk program anti-krisis tertentu daripada memberikan sumber daya tambahan kepada pemerintah daerah yang kurang efisien. Dengan demikian, transfer dapat memiliki efek ganda. Pertama bagian dari belanja daerah dalam total anggaran daerah berkurang yang kondusif untuk pertumbuhan. Kedua, sumber daya keuangan dihabiskan oleh pejabat daerah yang lebih berkualitas.

Di sisi lain penelitian dari (Kusuma 2016) juga mendapatkan hasil yang sama, dimana desentralisasi melalui dana transfer memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan Sulawesi. Artinya dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya untuk membantu daerah dalam meningkatkan perekonomian.

Pengaruh Rasio Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Artinya ketika rasio belanja modal mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan namun tidak begitu berarti, sebaliknya jika rasio belanja modal mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma 2016) juga mendapatkan hasil yang sama dimana rasio belanja modal daerah pada era desentralisasi dimana pemerintah daerah telah diberikan

wewenang penuh dalam pengalokasian belanja modal telah sanggup untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di daerah meskipun tidak signifikan. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga pada sector sumber daya manusia, dimana hal ini akan membentuk pertumbuhan ekonomi yang konsisten.

Hasil ini sejalan dengan penelitian dari (Canavire-Bacarreza, Martinez- Vazquez, and Yedgenov 2020) yang menunjukkan bahwa desentralisasi pengeluaran atau rasio belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi terutama pada negara-negara berkembang, hal ini dikarenakan alasan reformasi desentralisasi di negara berkembang sering kali didasarkan pada dampak menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan reformasi desentralisasi fiskal dapat menawarkan banyak hasil positif lainnya kepada negara-negara berkembang yang mengadopsi kebijakan tersebut. Artinya ketika pemerintah daerah mengeluarkan lebih banyak belanja modal maka pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal daerah dalam pelaksanaan desentralisasi telah berjalan semestinya, dimana melalui belanja modal maka daerah akan mampu menciptakan berbagai macam pelayanan publik sehingga hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara teori, pendekatan kuantitatif terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran, semakin besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pegawai pemerintah daerah dengan proporsi rata-rata lebih dari 40% tentunya akan mendapat respon positif dari pertumbuhan ekonomi.

Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari (Nantharath et al. 2019) yang menunjukkan bahwa desentralisasi pengeluaran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan politik yang memberikan dampak signifikan pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya pada redistribusi anggaran pemerintah daerah di seluruh negara. Faktor lainnya adalah peningkatan pesat anggaran pemerintah kota metropolitan kemudian mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi stagnasi dalam investasi publik di tingkat local di seluruh negeri, sehingga menyebabkan ketinggalan output industri dan produk provinsi bruto.

SIMPULAN

Berdasarkan estimasi regresi panel yang sudah dilakukan, fixed effect model adalah model terbaik yang bisa digunakan dalam penelitian ini. Dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan transfer, dan rasio belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, baik secara simultan maupun secara parsial, dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini mengartikan bahwa ketika derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan yang signifikan. (2) Ketergantungan transfer memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. hal ini mengartikan bahwa ketika ketergantungan transfer mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. (3) Rasio belanja modal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. artinya ketika rasio belanja modal daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat tetapi tidak signifikan. (4) Derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan transfer, dan rasio belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama.

DAFTAR RUJUKAN

Aulia, Nelly. 2014. "Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,

- Tingkat Kemiskinan, Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.” *Economics Development Analysis Journal* 3(2): 327–36.
- Basuki, Tri Agus, and Nano Prawoto. 2017. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Bisnis.com. 2020. “Sumut Menargetkan Pendapatan Asli Daerah Rp5,97 Triliun.” <https://sumatra.bisnis.com/read/20200217/534/1202235/sumut-menargetkan-pendapatan-asli-daerah-rp597-triliun>.
- Canavire-Bacarreza, Gustavo, Jorge Martinez-Vazquez, and Bauyrzhan Yedgenov. 2020. “Identifying and Disentangling the Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth.” *World Development* 127: 104742. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742>.
- Delingga, Redza, and Taufiq Marwa. 2016. “Kausalitas Antara Penerimaan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lubuklinggau.” 14(25): 59–63.
- Dinar, and Hasan. 2018. CV. Nur Lina *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*.
- Finance, Detik. 2016. “Begini Kondisi Perekonomian RI Selama 2015.” *detik Finance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3198709/begini-kondisi-perekonomian-ri-selama-2015>.
- Ginting, Ari Mulianta, Muhammad Zilal Hamzah, and Eleonora Sofilda. 2019. “The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth in Indonesia.” *Economic Journal of Emerging Markets* 11(2): 152–60.
- Haryanto, Joko Tri. 2015. “Desentralisasi Fiskal Seutuhnya.” <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika, and A.A.N.B Dwirandra. 2014. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi.” *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 1: 79–92.
- Khamdana, Abdillah. 2016. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia, 2008 – 2012.” *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 1(1): 23–38.
- Kusuma, Hendra. 2016. “Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9(1): 1–11.
- Nantharath, Phouthakannha, Sirisak Laochankham, Peerasit Kamnuasilpa, and Eungoo Kang. 2019. “Fiscal Decentralization and Economic Growth in Thailand: A Cross-Region Analysis.” *International Journal of Financial Research* 11(1): 147.
- News, DDTC. 2019. *Desentralisasi Dan Ketergantungan Fiskal Daerah*. Jakarta.
- Putra, Rico, and Surya Hidayat. 2016. “Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.” 3(4):243–56.
- Rahman, Taufik, Wayan Suparta, and Arivina Ratih Taher. 2018. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera Taufiqur.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7(2).
- Samudra, Galang, and Nur Handayani. 2020. “Pengaruh Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(4).
- Sumut, Diskominfo. 2019. “Provinsi Sumatera Utara Dongkrak PAD Lewat Pengoptimalan TI.” <https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-1763-provinsi-sumatera-utara-dongkrak-pad-lewat-pengoptimalan-ti.html>.
- Tirto. 2016. “Penerimaan Pajak Semester I-2016 Turun Rp17,7 Triliun.” *tirto.id*. <https://tirto.id/penerimaan-pajak-semester-i-2016-turun-rp177-triliun-bsU5>.
- Triani, Mike. 2015. “Analisis Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.” *Snema* (c): 9.
- Wahyuningsih, Tri. 2020. *Ekonomi Publik*. ed. Monalisa. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Widiaty, Eny, and Anton Priyo Nugroho. 2020. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri Dan Pembiayaan Syariah.” 6(02): 223–38.

Yang, Zhou. 2016. “Tax Reform, Fiscal Decentralization, and Regional Economic Growth: New Evidence from China.” *Economic Modelling* 59: 520–28. <http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2016.07.020>.

Yushkov, Andrey. 2015. “Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirics, and the Russian Experience ^.” *Russian Journal of Economics* 1(4): 404–18. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ruje.2016.02.004>.
